

INTISARI

Rekonstruksi ruang selalu menjadi keharusan dalam proses pembangunan. Ketimpangan antara jumlah penduduk dan jumlah lahan yang ada membawa masing-masing aktor untuk saling berkontestasi memperebutkan ruang yang masih tersedia. Kontestasi dapat dilihat dari banyaknya kasus pengambilan lahan masyarakat dengan dalih pembangunan. Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) mencatat dari total 178 konflik akibat program pemerintah, 90 persen disumbang oleh Indonesia. Di Jakarta, penggusuran masyarakat demi pembangunan tercermin dengan baik dalam kasus pembangunan Jakarta Internasional Stadium yang dilangsungkan dengan menggusur masyarakat Kampung Bayam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi adanya tarik menarik kekuatan pada dinamika kontestasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pengelola dalam pembangunan JIS dan penggusuran Kampung Bayam. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menemukan bahwa kontestasi yang terjadi menimbulkan adanya pergeseran penggunaan ruang di Kampung Bayam, dari yang awalnya merupakan ruang publik berubah menjadi hunian privat. Penelitian ini menemukan Pemerintah dengan relasi kuasa yang lebih besar mampu berganti-ganti kebijakan mengikuti pemaknaannya pada ruang yang didasarkan atas nilai ekonomis. Sementara masyarakat, terus mengorganisir kelompoknya dan melakukan perlawanan dengan tampil secara simbolik di tengah ruang publik untuk mempertahankan tempat tinggalnya. Kontestasi yang terjadi masih didominasi oleh pemerintah dan pengelola selaku pemegang kuasa dan menghasilkan dampak eksklusif sosial dan deprivasi ekonomi bagi masyarakat Kampung Bayam. Analisis pada kontestasi didasarkan atas teori Lefebvre yang melihat kontestasi dari tiga aspek, yaitu *spatial practice*, *representation of space*, dan *space of representations*.

Kata Kunci: *Ruang publik, Kontestasi, Kampung Bayam, Penggusuran, Perlawanan*

ABSTRACT

Spatial reconstruction has become an inevitable requirement in the process of development. The imbalance between population growth and the availability of land has driven various actors to compete for the remaining spaces. This contestation is evident in numerous cases of land appropriation from local communities under the pretext of development. The Agrarian Reform Consortium (Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA) recorded that out of 178 conflicts resulting from government programs, 90 percent occurred in Indonesia. In Jakarta, the displacement of communities for development purposes is clearly illustrated in the construction of the Jakarta International Stadium (JIS), which involved the eviction of residents of Kampung Bayam.

This study aims to explore the power dynamics underlying the contestation among the government, local communities, and managing authorities in the development of JIS and the eviction of Kampung Bayam residents. Employing a qualitative research method, the study finds that the contestation has led to a shift in spatial use in Kampung Bayam, from what was initially a public space to private housing. The findings indicate that the government, possessing greater power relations, is able to alter policies according to its interpretation of space based on economic value. Meanwhile, the community continues to organize collectively and engage in resistance by symbolically occupying public spaces to defend their place of residence. The contestation remains dominated by the government and managing authorities as the primary holders of power, resulting in social exclusion and economic deprivation for the Kampung Bayam community. The analysis of this contestation is grounded in Lefebvre's theory, which conceptualizes space through three dimensions: spatial practice, representations of space, and spaces of representation.

Keywords: *Public Space, Contestation, Kampung Bayam, Eviction, Resistance*